

# PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN (Studi di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)<sup>1</sup>

Oleh : Riska Porawouw<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, peran tokoh masyarakat belum seperti yang diharapkan dalam mempengaruhi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan yang ada di kelurahan. Indikasi dari permasalahan tersebut diatas adalah: pertama, kualitas rekam jejak tokoh masyarakat masih belum menunjukkan kepemimpinan yang universal, dimana tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya. Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual. Kedua, tokoh masyarakat yang ada di kelurahan duasudara terkesan kurang aktif dan peduli menyikapi permasalahan yang ada di wilayah kelurahan, terlebih khusus permasalahan pembangunan, seperti prasarana air bersih, jalan setapak, tempat penampungan sampah, dan saluran air. Ketiga, tokoh masyarakat lebih cenderung memilih untuk menunggu proyek pembangunan yang datang dari pemerintah kota, tanpa ada inisiatif untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah kelurahan, dan menggerakkan, memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif memperbaiki, atau membangun sarana dan prasarana publik yang ada di wilayah kelurahan. Keempat, masih rendahnya rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab dari tokoh masyarakat yang ada, kecenderungan tokoh masyarakat lebih kepada kelompok/golongan yang terikat primordial, seperti satu suku, satu agama, satu profesi.*

*Hal tersebut diatas disebabkan karena faktor etnisitas, ataupun kekerabatan yang masih amat kental pada perilaku tokoh masyarakat, sehingga keberadaan tokoh masyarakat dengan model tersebut, dapat menghambat proses peningkatan partisipasi masyarakat.*

***Kata Kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Pembangunan.***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan mutlak diperlukan pada suatu Negara, karena dengan pembangunan mengindikasikan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan

---

<sup>1</sup> Merupakan tulisan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai.

Pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan hampir disemua daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terkesan menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan warga Negara hanya menjadi objek dari pembangunan. Yang diharapkan adalah swadaya dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat hasil dari pembangunan hakekatnya untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat cenderung lebih menggantungkan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah, sehingga walaupun sudah mendesak terhadap produk dari suatu pembangunan, harus menunggu tindakan dari pemerintah. Perilaku ketergantungan ini lebih nyata pada masyarakat yang bermukim di daerah perkotaan, dimana kebanyakan masyarakat lebih baik menunggu action dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur.

Inisiatif yang diprakarsai oleh masyarakat sendiripun terbilang rendah, inisiatif masyarakat akan tumbuh apabila ada stimulus dari pemerintah, seperti pada program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dimana pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan dana. Inisiatif yang dimaksudkan disini lebih mengarah kepada partisipasi masyarakat itu sendiri. Pasca reformasi yang terjadi, gencar di suarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tetapi hal ini belum dapat dikatakan maksimal, karena hamper sebagian besar masyarakat yang tersebar di daerah-daerah belum menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dalam pembangunan, baik itu yang sifatnya berupa gagasan/ide-ide, materil, dan tenaga. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan agak terasa di wilayah pedesaan, dimana rasa kekeluargaan dan gotong royong yang masih terjaga dan terpelihara, namun tidak demikian bagi wilayah perkotaan. Hal ini dapat disebabkan adanya perbedaan antara desa dan kota, dimana masyarakat kota yang heterogen sulit untuk berbaur dalam proses asimilasi budaya, sehingga ada kelompok masyarakat yang membawa budaya gotong royong dari daerah asalnya, tetapi tidak didukung oleh kelompok masyarakat yang lain, sehingga lama-kelamaan hal ini dapat menumbuhkan sikap apatis dimasyarakat dalam memprakarsai dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat perkotaan dalam pembangunan, mungkin saja dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas para tokoh-tokoh masyarakat yang ada melalui pengaru yang diberikan, namun sayangnya tokoh-tokoh masyarakat sendiripun belum memainkan peran yang maksimal dalam kegiatan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Tokoh masyarakat cenderung mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh

masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. Kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (famili) dan kesukuan.

Dalam masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di daerahnya. Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan.

Di Kelurahan Dudasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, peran tokoh masyarakat belum seperti yang diharapkan dalam mempengaruhi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan yang ada di kelurahan. Indikasi dari permasalahan tersebut diatas adalah: pertama, kualitas rekam jejak tokoh masyarakat masih belum menunjukkan kepemimpinan yang universal, dimana tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya. Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual. Kedua, tokoh masyarakat yang ada di kelurahan duasudara terkesan kurang aktif dan peduli menyikapi permasalahan yang ada di wilayah kelurahan, terlebih khusus permasalahan pembangunan, seperti prasarana air bersih, jalan setapak, tempat penampungan sampah, dan saluran air. Ketiga, tokoh masyarakat lebih cenderung memilih untuk menunggu proyek pembangunan yang datang dari pemerintah kota, tanpa ada inisiatif untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah kelurahan, dan menggerakkan, memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif memperbaiki, atau membangun sarana dan prasarana publik yang ada di wilayah kelurahan. Keempat, masih rendahnya rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab dari tokoh masyarakat yang ada, kecenderungan tokoh masyarakat lebih kepada kelompok/golongan yang terikat primordial, seperti satu suku, satu agama, satu profesi.

Hal tersebut diatas disebabkan karena faktor etnisitas, ataupun kekerabatan yang masih amat kental pada perilaku tokoh masyarakat, sehingga keberadaan tokoh masyarakat dengan model tersebut, dapat menghambat proses peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga, jika hal tersebut diarahkan untuk kepentingan pembangunan, maka hal tersebut dapat menjadi kekuatan/modal bagi pelaksanaan pembangunan partisipatif.

Kuatnya Ikatan kekerabatan (darah dan kekeluargaan) dan kesamaan kesukuan, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang membentuk perilaku masyarakat, menjadikan masyarakat lebih berpartisipasi apabila merasa satu etnis/suku/agama. Etnisitas menjadi hal sangat mendasar dalam tingkah laku tokoh masyarakat di kelurahan duasudara. Berangkat dari fakta objektif yang diuraikan diatas, yang mengindikasikan peran tokoh masyarakat di kelurahan duasudara, masih tergolong sektarian dan dapat menghambat proses partisipasi masyarakat, maka penelitian ini lebih

mengfokuskan kepada peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan duasudara kecamatan ranowulu kota bitung.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena mengenai peran tokoh masyarakat, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan duasudara?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam kegiatan memotivasi, masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademis: memberikan sumbangan secara ilmiah dan akademis terhadap pengembangan teori politik terkait peran tokoh masyarakat.
- b. Sebagai masukan bagi tokoh masyarakat guna memberikan pengetahuan dan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan di Kelurahan Duasudara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Tokoh Masyarakat**

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama. Pertanyaan yang kemudian yang muncul adalah, siapakah tokoh masyarakat itu? Apa saja kaitan antara tokoh masyarakat dengan perkembangan masyarakat? Menurut Surbakti (1992:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara.

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya.

Karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.

Akan tetapi, pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. *Pertama*, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. *Kedua*, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula.

Pada pihak lain tidak hanya di Negara-negara berkembang seorang pemimpin kharismatik dipandang sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga di Negara-negara yang maju seorang pemimpin diharapkan tampil sebagai “wakil” atau personifikasi bangsa di dalam maupun di luar negeri (surbakti, 1992:45).

Ketokohan tersebut merupakan aktualisasi dari masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang kharismatik, yang memungkinkan tercapainya keinginan dan harapan masyarakat di daerah tempatnya bermukim. Masyarakat tentunya menurut Wikipedia bahasa Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>), Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.

Kata *society* berasal dari bahasa latin *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Dapat kita telaah korelasi hubungan antara ketokohan didalam masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri. Dari sejumlah asumsi dasar tersebut maka secara esensial pendekatan secara sosiologis ini mengkaji kehidupan sosial manusia sebagai berikut:

Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, serta setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Setiap

bagian dari suatu masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keseimbangan (*equilibrium*) dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercipta harmoni atau stabilitas.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain (Philipus, 2006:31).

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya (Soerjono Soekanto, 2007:197).

Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin juga keturunan yang terhormat (Soerjono Soekanto, 2007:199).

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor timbulnya pelapisan dalam masyarakat/*stratifikasi sosial*, Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu.

Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan pedesaan. Peran ini kemudian menjadi faktor yang signifikan didalam proses mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya (Miriam Budiarjo, 1972:10). Tentu saja ketokohan seseorang dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan dengan suatu kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kejadian diwarnai dari segi kepemimpinan seorang tokoh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya *paternalistik*, di mana peran seorang tokoh/elite dalam masyarakat desa adalah sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada

aras desa. Sementara itu, apa yang disebut dengan elit desa setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintahan, elit agama, elit ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat sebagai para *stakeholders* dengan fungsi dan peranan yang berbeda-beda.

Elit pemerintahan ditunjukkan dengan adanya kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Elit agama adalah tokoh panutan dalam agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama lainnya. Elit ekonomi adalah golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk para pemilik lahan. Elit Ormas merupakan tokoh dalam organisasi kemasyarakatan atau politik yang ada di desa, elit intelektual adalah ditokohkan karena kecerdasan dan kepandaianya atau karena pendidikannya, sedangkan mereka bisa berprofesi guru, pegawai/pejabat pemerintahan, sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan.

Berkenaan dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat mungkin mereka menyandang lebih dari 1 (satu) jenis elit, misalnya seorang kepala desa selain elite pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan elit agama, begitu pula untuk tokoh/elit yang lain. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah kemampuan-kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat perilaku kehidupan praktisnya.

Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta kecakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual, serta komunikasinya. Manusia-manusia yang terlahir sebagai sosok cakap dalam berbagai kemampuan, kemudian menjadi perhatian masyarakat sebagai sosok yang dalam pandangan umum masyarakat sebagai manusia yang hebat.

## **B. Partisipasi Masyarakat**

### **1. Kosep Partisipasi**

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsure keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu: *Participation* ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, to *Participate* adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, "participation" adalah hal mengambil bagian. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu terkandung adanya keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini kemudian didukung oleh definisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie Bahwa: *Participation* adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan, *participation* adalah pengikut sertaan suatu aktifitas untuk membangkitkan persamaan serta dalam kegiatan organisasi, turut dalam serta dalam organisasi". (The Liang Gie, 1998:103)

*Participation* adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan. Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut

dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong Oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagian (2007:96) bahwa: Penggerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien seta ekonomis.

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2013:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (2011:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

## **2. Konsep masyarakat**

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan Society (Latin) “Society” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan sebagai berikut: *Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan.*

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Lebih



lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa: Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.” Selanjutnya batasan sebagai berikut: Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka.

Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial.

Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahuimelalui adanya kontak sosial (*Social Contact*) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan

Menurut Mikkelsen (2011:67), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep man-centred development (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

Menurut Mikkelsen (2011:69), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu:

1. Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.

2. Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (counsellors) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
3. Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.
4. Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku they/we menjadi perilaku us.

Sementara itu menurut Riant Nugroho (2007:9), tujuan utama partisipasi adalah:

1. Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan;
2. Untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana;
3. Untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan.

### **C. Konsep Pembangunan**

Pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Keegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi, 2004:59).

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasar pada suatu rencana. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh untuk merealisasinya.

Kemudian perencanaan sebagai proses yang meliputi (Tjokroamidjoyo, 1996:189) sebagai berikut: Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti langkah-langkah kegiatan (measure) untuk merealisasinya.

Meskipun diakui bahwa suatu rencana pembangunan memang suatu alat yang lebih baik untuk proses perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana.

Dari beberapa definisi perencanaan pembangunan tersebut diambil makna tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan dan tahap-tahap yang di dalamnya. Kemudian hubungannya dengan konsep pembangunan daerah sebagai tempat proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang berdifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas (Riyadi, 2004:61).

Kemudian Menurut GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean Urban Project (2000) mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah "...suatu yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: (a) secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (c) Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan".

Dari definisi tersebut mempunyai makna proses perencanaan pembangunan melibatkan para aktor yang berinteraksi pada tingkatan berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara yang sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini ialah deskriptif, yaitu mencoba membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu secara kualitatif (Mansyuri, 2008:12).

## **B. Informan Penelitian**

Pemilihan informan yang akan peneliti wawancarai pada penelitian ini menggunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan beberapa pertimbangan tertentu.

Informan dipilih dari 4 (empat) kategori tokoh yakni:

1. Tokoh adat alasan dipilihnya tokoh adat dalam penelitian ini ialah, karena tokoh adat dianggap mampu menjaga tradisi serta nilai-nilai budaya kesukuan/etnosentrisme.
2. Tokoh Agama alasan dipilihnya tokoh agama, karena tokoh agama dianggap mampu memberi pengaruh dalam konteks keagamaan.
3. Tokoh Pemuda alasan dipilihnya tokoh pemuda dikarenakan tokoh pemuda mempunyai kedekatan dengan beberapa aliansi organisasi kepemudaan yang ada.
4. Tokoh Intelektual alasan dipilihnya tokoh intelektual dikarenakan mempunyai pengaruh penting dalam mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Masyarakat yang ada di kelurahan duasudara.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah peran dari tokoh masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat yang meliputi:

1. Motivasi tokoh masyarakat
2. Partisipasi masyarakat melalui:
  - a. Pemikiran atau Ide-ide berupa masukan
  - b. Uang atau Dana
  - c. Materi atau Barang
  - d. Tenaga (Fisik)
3. Partisipasi Tokoh-Tokoh Masyarakat dalam pembangunan

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan pertanyaan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dan merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi untuk mendapatkan data yang akurat dan kongkrit

Wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin menggali informasi secara langsung dan jelas dari informan.

## 2. Studi pustaka dan dokumen

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperkuat validitas data primer atau data utama yang peneliti peroleh dari para informan. Teknik ini kemudian membantu peneliti didalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya tentang tokoh masyarakat dan perilaku memilih.

### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai peran tokoh masyarakat dalam proses pembangunan.

## **PEMBAHASAN**

Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Dudasudara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan dan evaluasi pembangunan sesuai dengan hasil penelitian dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1). Perencanaan Pembangunan

Partisipasi tokoh agama dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang Agama, dalam meningkatkan kesadaran warga masyarakat supaya rajin melaksanakan kegiatan ibadah secara rutin yakni dengan cara melakukan pendekatan secara akrab, menyampaikan ceramah tentang agama, saling bertukar pikiran dengan warga pada saat waktu luang misalnya di warung kopi pada malam hari.

Partisipasi tokoh adat di Kelurahan Dudasudara selalu memberikan gambaran dan pemahaman kepada warga masyarakat untuk bisa merubah kebiasaan yang diyakini oleh warga yang diantaranya pada setiap akan melaksanakan pesta dengan memberikan kepercayaan masing-masing. Dengan memberikan gambaran yang telah ada di daerah lain, agar masyarakat mampu menerima masukan tersebut.

Partisipasi selaku tokoh pendidikan, memberikan pengarahan kepada warga agar selalu memotivasi anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah. Memberikan pandangan tentang perencanaan mutu pendidikan sesuai perkembangan jaman. Para remaja, pemuda/i juga diberikan pengarahan yang berhubungan dengan pendidikan lewat rapat organisasi mereka.

Partisipasi selaku tokoh pemuda, melakukan pendekatan kepada beberapa remaja, pemuda/i Unteboang, kemudian memngadakan rapat membentuk sebuah organisasi kepemudaan dan menentukan orang yang bisa memimpin organisasi tersebut dibawah pimpinan tokoh pemuda (ketua, sekretaris, bendahara dan pengurus lainnya). Dalam rapat tokoh pendidikan juga memberikan ide supaya di Kelurahan Dudasudara di buka sebuah kursus salon dan menjahit untuk menambah pengalaman dan pengetahuan para remaja, pemuda/i khususnya yang putus sekolah dan pengangguran.

### 2) Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan

Partisipasi selaku tokoh agama, selalu ikut dalam kegiatan kebersihan lingkungan Mesjid/Gereja dengan menyediakan makanan ringan dan minuman para warga, supaya tetap bersemangat melakukan pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing tanpa mengharap imbalan. Bentuk partisipasi fisik yang dilakukan seperti pada saluran air dan lain-lain, disamping juga ikut memberikan sumbangan (uang) sesuai kemampuan, apabila dalam pelaksanaan pembangunan mengalami kekurangan biaya, responden ikut memberikan solusi mencari dana diluar kelurahan demi kelancaran pembangunan tersebut. Di samping itu juga ikut megawasi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi selaku tokoh Adat, seperti memelopori dan menghadiri acara adat seperti syukuran maupun duka. Ikut memberikan masukan apabila warga mengalami masalah tentang adat dan budaya. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan fisik juga ikut serta bersama para tokoh yang lain.

Partisipasi selaku tokoh Pendidikan, selalu memberikan ide-ide untuk perkembangan mutu pendidikan di kelurahan. Memotivasi para pemuda khususnya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melibatkan para anak-anak, remaja maupun pemuda dalam mengikuti berbagai perlombaan yang terkait dengan dunia pendidikan baik yang dilaksanakan di daerah maupun di luar daerah.

Partisipasi selaku tokoh pemuda, selalu mendampingi dan memelopori para pemuda dalam setiap kegiatan keorganisasian yang di selenggarakan di Kelurahan Dudasudara ataupun di luar kelurahan, misalnya kegiatan olahraga dan rekreasi bersama pada hari libur. Memberikan masukan-masukan yang mendukung perkembangan organisasi tersebut.

### 3). Pemanfaatan Pembangunan

Selaku tokoh agama dalam pemanfaatan hasil pembangunan tidak terlepas dari dukungan dan motivasi yang diberikan kepada warga, dan keinginan warga dalam melaksanakan ibadah secara rutin semakin besar. Kebersihan lingkungan menjadi lebih baik dengan ikut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan khususnya pada tempat beribadah seperti Mesjid maupun Gereja. Bagi para warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tokoh agama mengarahkan warga agar memanfaatkan pelaksanaan pembangunan sebagai lahan pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga. Mereka di beri upah sesuai kemampuan masing-masing, seperti para pemuda yang masih pengangguran.

Selaku tokoh adat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, selalu menjaga kelestarian budaya/adat istiadat yang sudah berkembang di Kelurahan Dudasudara. Ikut memberikan berbagai ide apabila warga membutuhkan masukan dari tokoh adat terutama dalam pelstarian budaya. Menghadiri pelaksanaan acara adat di kelurahan bahkan acara adat dan istiadat yang dilaksanakan di luar Kelurahan Dudasudara.

Berdasarkan hasil hasil wawancara memberikan informasi kepada para remaja, pemuda dan memotivasi mereka mengikuti berbagai perlombaan yang terkait dengan kegiatan pendidikan yang di laksanakan lewat sekolah, rajin mencari informasi tentang pendidikan leawat internet, TV dan media lainnya.

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda, mengarahkan para remaja, pemuda untuk turut serta dalam pelaksanaan pertandingan-pertandingan pada hari- hari besar dengan para remaja, pemuda lain. Mengajak para pemuda untuk

ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan seperti pembangunan jembatan, jalan dan sarana, serta ikut menggerakkan pemuda dalam pelaksanaan kebersihan lingkungan kelurahan.

#### 4). Evaluasi Keberhasilan Pembangunan

Hasil wawancara dengan tokoh agama, ikut serta dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan sampai dimana pelaksanaannya, apabila terdapat kekurangan atau kendala tokoh masyarakat mencari solusi penyelesaian yang tepat dengan memberikan usul kepada pemerintah kelurahan demi kesempurnaan pelaksanaan pembangunan kelurahan agar sesuai dengan yang di harapkan.

Hasil wawancara dengan tokoh adat, ikut serta dalam menyusun perencanaan dan laporan hasil pembangunan. Dalam hal ini bekerjasama dengan pihak kepengurusan yang telah ditentukan untuk menangani pelaksanaan pembangunan kelurahan, sehingga laporan pelaksanaan pembangunan kelurahan tersebut terperinci dengan baik.

Hasil wawancara dengan tokoh pendidikan, ikut menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai warga masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Mengajak masyarakat agar tetap memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan serta berupaya untuk mengenali potensi yang dimiliki para warga masyarakatnya.

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda, ikut mengarahkan warga masyarakatnya khususnya para remaja dan pemuda untuk tetap mempertahankan semangat dan motivasi membangun sehingga kelurahan tersebut bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan pembangunan baik yang berasal dari bantuan pemerintahan pusat maupun daerah.

Hasil Pembangunan Setelah Melibatkan Tokoh-Tokoh Masyarakat diketahui kondisi mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia dan kondisi pembangunan kelurahan secara fisik. Perkembangan kebudayaan dan adat istiadat seperti para warga Kelurahan Duasudara tidak lagi pergi ke tempat pemakaman keluarga dengan membawa sesajian berupa makanan yang sebelumnya selalu mereka lakukan dan setiap akan melaksanakan pesta syukuran/pesta. Kebiasaan tersebut telah di perbaharui dengan mengadakan acara doa bersama keluarga besar di rumah dengan harapan acara pesta tersebut dapat berjalan dengan baik. Misalnya dari sisi menu makanan dalam pesta yang tidak terlalu berlebihan.

Mutu pendidikan di Kelurahan Duasudara setelah para tokoh masyarakat terlibat, terlihat semakin berkembang. Minat para orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka kejenjang yang lebih tinggi semakin besar. Motivasi anak-anak usia sekolah semakin tinggi untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka berjuang keras agar bisa lulus dengan nilai yang baik. Angka putus sekolah semakin berkurang dan mereka sudah termotivasi untuk tetap sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi walaupun tidak harus jauh-jauh keluar kota.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Motivasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat belum efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini disebabkan kurangnya peran dari masing-masing tokoh yang ada di kelurahan Dudasudara, karena kesibukan/aktivitas yang harus dijalani oleh masing-masing tokoh masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat kelurahan Dudasudara dapat dinilai sudah baik, namun hanya terbatas pada bentuk partisipasi tertentu seperti partisipasi ide dan partisipasi uang, hal ini disebabkan dengan memberikan partisipasi ide dan uang mekanismenya lebih mudah.
3. Adanya partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dapat menjadi teladan dan panutan warga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### **B. Saran**

1. Diperlukan peran yang lebih besar bagi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Dudasudara melalui pembentukan suatu wadah formal, agar tokoh masyarakat dapat berbuat secara konkrit memotivasi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.
2. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya pada bentuk partisipasi ide dan uang, tetapi dalam hal pemberian tenaga dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah kelurahan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mewujudkannya.
3. diperlukan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemberi contoh bagi masyarakat, agar masyarakat lebih termotivasi dalam berpartisipasi khususnya dalam pembangunan yang ada di Kelurahan Dudasudara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Britha Mikkelsen. 2011. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, Yayasan Obor Indonesia.
- Isbandi rukminto Andi. 2013. Kesejahteraan Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1972. Dasar-Dasar ilmu politik, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Mansyuri, dan Zainuddin. 2008. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis, PT. Refika Aditama, Malang.
- N.H.T. Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Surabaya.
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah,PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.
- Philipus, & Nurul Aini. 2006. Sosiologi dan Politik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riant Nugroho, Randy. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar & Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Elex Media Komputindo.
- Surbakti. 1992. Memahami ilmu politik, PT. Grasindo, Jakarta.
- Soerjono soekanto. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Sondang P. Siagian. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi revisi), bumi aksara, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1996. Perencanaa Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- The Liang Gie. 1998. Administrasi Perkantoran Modern, Liberty, Jakarta.